

ABSTRAK

Pasca Soeharto jatuh di tahun 1998, usaha mendorong gagasan rekonsiliasi dalam kasus tragedi 1965-1966 telah melewati jalan negosiasi yang panjang. Dalam berbagai momen, bahkan telah menimbulkan situasi polemik politik yang keras dan alot. Sebagian suara masyarakat, terutama korban/penyintas dan keluarga korban menghendaki agar kejahatan masa lalu bisa diungkap. Namun tidak sedikit dari sebagian besar kekuatan politik lama masih tetap kokoh menutup diri dan menolak gagasan pengungkapan kebenaran masa lalu dan jalan rekonsiliasi. Berbagai inisiasi rekonsiliasi pada akhirnya terpaksa harus bernegosiasi dengan berbagai kecenderungan wacana politik lama yang masih bertahan. Pelembagaan pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) menjadi bagian lokus materi perdebatan yang cukup menguras energi. Proses pelembagaan pada akhirnya juga harus terganjal di jalan. UU KKR yang sudah berhasil dibentuk justru lalu dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Hingga riset ini dikerjakan, beberapa siasat untuk mengatasi jalan buntu terus diupayakan, walaupun belum menemukan momen konsensus bersama yang ideal. Dari beberapa analisis data yang dielaborasi dalam riset ini setidaknya menemukan problem mendasar, betapa warisan politik masa lalu, terutama diskursus ‘anti-komunis’ ternyata masih kuat bertahan. Dimensi ini menjadi salah satu variabel penghambat gagasan rekonsiliasi. Tertatih-tatihnya wacana rekonsiliasi membuktikan bahwa konfigurasi politik lama, dalam beberapa hal masih kuat dan belum bergeser dalam membangun lanskap narasi hegemonik tentang tragedi 1965-1966. Dengan sekian momen pengalaman negativitasnya, imbas tragedi mampu mengkreasi banyak momen artikulasi wacana yang berelasi erat dengan persoalan bagaimana berbagai imaji tentang keindonesiaan, demokrasi dan HAM diperbincangkan dan dinegosiasikan kembali. Lanskap konfigurasi wacana rekonsiliasi pada akhirnya juga bisa dibaca sebagai momen artikulasi pertarungan hegemoni wacana untuk memperebutkan imaji-imaji besar tersebut. Melalui pendekatan analisis wacana ‘pasca-Strukturalis’ yang dielaborasi Ernesto Laclau dan Chantal Mouffe berhasil membantu untuk membaca secara kritis tentang lokus persoalan rekonsiliasi ini. Beberapa poin catatan kesimpulan yang berhasil didapat adalah (1) bahwa polemik wacana rekonsiliasi pada akhirnya bisa dibaca sebagai wujud negosiasi untuk memperebutkan fiksasi makna; (2) Transisi politik demokrasi sendiri tidak difahami sebagai periode waktu mekanis tetapi merupakan fase politik yang dinamis dengan sekian aspek kondisi ‘kontinuitas’ dan ‘diskontinuitasnya’; (3) Preferensi-preferensi wacana rekonsiliasi (keindonesiaan, demokrasi dan HAM) pada praktik artikulasinya tidak akan pernah solid dan kokoh; (4) Mekanisme kompromi konsensual tak lebih dari modus dan siasat politik untuk pengingkaran jalan rekonsiliasi yang sebenarnya; (5) Setidaknya ada empat kecenderungan pola yang bisa dilihat dari konfigurasi wacana rekonsiliasi yang berkembang; (6) Rekonsiliasi juga pada akhirnya bisa dibaca sebagai jalan memperebutkan fiksasi makna atas masa lalu; (7) Riset menemukan poin kesimpulan penting bahwa masa depan rekonsiliasi hari ini semakin kehilangan momentumnya.

Kata Kunci: *Tragedi 1965-1966, Rekonsiliasi, Analisis Wacana Pasca-Strukturalis, Doktrin Relasi Internasil, Poin Differensiasi, Poin Ekuivalensi, Negosiasi, Kontestasi, Artikulasi, Nodal Point, Hegemoni, Disensus, Politik Memori, Negativitas, Keindonesiaan, Demokrasi dan HAM.*